



Penindakan Pedagang Sate Masih Angin- anginan

Dewan Soroti Pemkot Belum Konsisten,
Dorong Maksimalkan Jogoboro dan Lainnya

JOGIA - Maraknya pedagang sate yang masih berjualan di trotoar Malioboro dan melanggar perda menuai sorotan DPRD Kota Jogja. Legislatif menilai penindakan pemkot terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata tersebut belum konsisten dan cenderung angin-anginan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mengatakan, penertiban aktivitas pedagang sate dan maupun PKL lainnya di kawasan Malioboro sejatinya bisa dioptimalkan. Pun sudah dikuatkan dengan instrumen pengamanan seperti Jogoboro, Pam Budaya, dan petugas Satpol PP Kota Jogja.

Menurut Sinar, pengamanan tersebut harus bisa lebih dimaksimalkan agar Malioboro benar-benar bisa menjadi destinasi wisata nyaman. Termasuk bebas dari gangguan PKL.

"Saya melihat masih angin-anginan, belum kemudian secara intensif dilakukan penegakannya," ujar Politisi Partai Gerindra itu saat ditemui, Rabu (4/2).

Meski mendorong ada penegakan aturan, Sinar berharap ada solusi bagi PKL di kawasan Malioboro. Contohnya para pedagang sate bisa diberikan tempat yang tidak mengganggu aktivitas wisatawan maupun masyarakat umum.

Upaya tersebut, kata Sinar, juga untuk memfasilitasi para pedagang sate yang berada di area Pasar Beringharjo.

Lantaran dia mengaku kerap mendapat keluhan dari pedagang pasar tradisional soal gangguan dari keputulan asap sate.

Menurutnya, tempat representatif bagi pedagang sate bisa diwujudkan dengan membuat ruang yang dilengkapi dengan kipas dan cerobong. Sehingga keputulan asap bisa diarahkan dan tidak menjadi polusi udara.

"Penataan bukan berarti kemudian mengusur, melarang untuk mereka berdagang, tapi ditempatkan pada tempat yang lebih representatif," jelasnya.

Radar Jogja telah berupaya mengkonfirmasi Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja Fitria Dyah Anggraeni soal peran Jogoboro di Malioboro. Namun hingga berita ini ditulis yang bersangkutan belum memberi tanggapan.

Sebelumnya, Sekretaris Satpol PP Kota Jogja Hery Eko Prasetyo mengaku sudah melakukan penertiban. Hanya memang belum dilakukan tindakan tegas dengan sanksi yustisi sesuai Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 dan Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 13 tahun 2022 tentang

PKL. Hery berdalih, pihaknya ingin lebih mengedepankan pendekatan humanis kepada para PKL. Kemudian kendala lain juga tidak sedikit PKL yang memanfaatkan waktu ketika tidak ada petugas berjaga. (inu/wia/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005